

# PENGARUH TRANSFER FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Oleh: **Andrian Dolfriandra Huruta**

## **Abstract**

This article aims to describe impact of fiscal transfer such as village funds allocation towards regional inequality in East Sumba. This article use data such as gross regional domestic product at 2000 constant prices and realization of village funds allocation from 2008 to 2010. The result shows that village funds allocation has a positive and significant impact to regional inequality. Therefore, it's necessary to create a generative relationship among developed region with the area behind it to remove regional inequality.

**Kata kunci:** Transfer Fiskal, Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Ketimpangan Wilayah

## **Pendahuluan**

Persoalan perimbangan keuangan kini memasuki babak baru. Dulu yang bertempur di arena keuangan adalah pusat dan daerah, namun sekarang yang bertempur adalah kabupaten dan desa/kelurahan. Eko (2008, dalam Kabalmay, 2008 : 4) menyebut bahwa ada 5 skema yang digunakan oleh pemerintah untuk menggelontorkan uang ke desa yaitu (1) Bantuan (stimulan). Ibarat kail atau pancing yang digunakan untuk memancing swadaya masyarakat, begitulah kira-kira analogi yang tepat untuk menggambarkan kehadiran uang di desa. Namun bantuan memiliki konotasi bahwa desa tidak mempunyai hak atas uang tersebut; (2) Insentif. Uang digunakan untuk merangsang desa agar lebih inovatif atau sebagai hadiah karena desa tersebut berprestasi; (3) Alokasi dana desa (ADD). Dana bagian dari dana desentralisasi yang merupakan hak desa untuk membiayai kewenangannya; (4) Akselerasi. Sebagai distribusi dana khusus untuk mempercepat penyiapan dan realisasi perencanaan desa atau sebagai dana untuk membiayai proyek percepatan pembangunan desa-desa

tertinggal; dan (5) Investasi. Pembiayaan oleh pemerintah atau swasta dalam membangun kawasan perdesaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang dekat dengan warga desa.

Dari kelima skema di atas, Kabalmay (2008 : 4) menyebut hanya ADD-lah yang diakui secara formal dan legal menjadi hak desa. Kehadiran UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No. 72 tahun 2005 memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, sehingga desa memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Sumber perolehan dana bagi desa merupakan hak perolehan pendapatan pemerintahan desa yang digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan di desa.

Dalam pemahaman di atas, maka Sony Sumarsono<sup>1</sup> pada sebuah seminar di Yogyakarta tahun 2007 (dalam Kabalmay, 2008: 4) menyebut bahwa uang yang akan masuk ke desa rata-rata sebesar Rp 2.000.000.000.000,- per desa per tahun. Mengingat besaran ADD yang disalurkan kepada desa nilainya cukup besar, maka diperlukan suatu perencanaan yang terintegrasi dan saling bersinergi satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD, maka Habriono (2008: 9) menyebut bahwa melalui alokasi dana tersebut, desa mempunyai peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Namun, akibat implementasi ADD yang beragam di daerah baik mengenai pola maupun besarnya, ADD belum dapat menjadi *mainstream* penanggulangan kemiskinan.

Dalam pemahaman di atas, menurut Habriono (2008: 9) ada 4 asumsi yang membuat ADD belum bisa menjadi *mainstream* dalam penanggulangan kemiskinan. **Pertama**, Besaran ADD yang “tanggung” (terbatas). Memang ADD secara signifikan masih merupakan sumber pendapatan desa yang sangat besar dan terbesar, tetapi dengan rata-rata penerimaan dana sebesar Rp 100.000.000,- per desa untuk membiayai berbagai macam anggaran di dalam APBDes jumlah ini dirasakan sangat terbatas.

---

<sup>1</sup> Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Direktorat Jenderal PMD Depdagri.

**Kedua**, penanggulangan kemiskinan bukan tanggung jawab pemerintah desa. Seringkali pemerintah desa tidak merasa bahwa kemiskinan yang melanda warganya merupakan tanggungjawab utamanya, karena kegiatan penanggulangan kemiskinan diambil alih oleh pemerintah pusat dan daerah lewat program-program PPK dan PNPM Mandiri. Dana PPK dan PNPM Mandiri yang masuk dan dibelanjakan desa, tidak dimasukkan di dalam struktur penerimaan dan pengeluaran APBDes padahal tugas kepala desa adalah menyusun dan mempertanggungjawabkan APBDes, sehingga akuntabilitas publik kepala desa dipertaruhkan di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena dana tersebut tidak masuk dalam struktur APBDes dan kepala desa tidak terlibat di dalam akuntabilitas publik dalam pemanfaatan dana tersebut, maka kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa “boleh merasa” tidak bertanggungjawab terhadap sukses atau tidaknya kegiatan PPK dan PNPM.

**Ketiga**, ketiadaan pendampingan dan dana pendampingan. Sangat disayangkan bahwa sejatinya masih sedikit pemerintah kabupaten yang memberikan ADD disertai dengan dana pendampingan. Contohnya, di kabupaten Flores Timur dan Ogan Komering Ilir yang memberikan dana pendampingan ADD. Bagi desa-desa yang mendapatkan pendampingan dari LSM atau perguruan tinggi menyelenggarakan berbagai kegiatan karena telah mendapatkan dana bantuan dari donor atau perusahaan dalam rangka pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di desa.

**Keempat**, *Social Distrust*. Kondisi masyarakat yang saling tidak percaya juga merupakan faktor penentu mengapa kebanyakan masyarakat desa lebih memilih dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dari pada kegiatan pengembangan modal usaha. Alasannya dana yang dipakai untuk pembangunan fisik akan segera dapat dihabiskan dan relatif mudah dipertanggungjawabkan. Berbeda jika dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan modal usaha dengan sistem dana bergulir (*revolving fund*) yang tentu membutuhkan keterampilan pembukuan, manajemen usaha dan sebagainya. Hal ini semakin diperkuat bahwa sejatinya masyarakat desa pada umumnya tidak terbiasa dengan pencatatan pembukuan, keterampilan yang rendah dan pengalaman-pengalaman sejenis yang hampir semuanya buruk. Pengalaman tersebut yang

menimbulkan “trauma” dan saling tidak percaya di antara warga di dalam desa.

Kemudian, Habriono (2008: 9) juga menyebut setidaknya ada tiga pola mekanisme pencairan dan pemanfaatan ADD seperti (1) Mekanisme *Block Grant* (alokasi umum), di mana dana diserahkan sekaligus secara penuh kepada desa dan desa mempunyai keleluasaan penuh untuk mengelola dana sesuai dengan kewenangan dan perencanaan desa; (2) Mekanisme *Specific Grant* (alokasi khusus), di mana dana yang diserahkan kepada desa diatur oleh pemerintah daerah untuk tujuan-tujuan khusus dan pemberiannya bertahap (biasanya 2 kali masa pencairan); dan (3) Mekanisme *Rigid Grant* (alokasi ketat), di mana pemerintah telah melakukan pengaturan penggunaan dana secara ketat, termasuk pola pencairan, penggunaan, pelaporan dan sebagainya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi pola pemberian ADD di luar ketiga mekanisme di atas. Oleh karena itu, Habriono (2008 : 9) menyebutkan bahwa seringkali pola yang digunakan adalah mekanisme alokasi sedekah yang memberikan dana ala kadarnya secara merata kepada seluruh desa. Namun, tidak jarang ada kabupaten memberikan ADD yang di dalamnya sudah termasuk penghasilan perangkat desa. Tentu kondisi ini telah menyimpang dari PP No. 72 tahun 2005 yang menegaskan bahwa ADD dibagi 30 persen untuk operasional (tidak termasuk penghasilan perangkat desa) dan selebihnya 70 persen untuk anggaran pemberdayaan dan pembangunan.

Di kabupaten Sumba Timur, selama kurun waktu 2008 – 2010 dana (Baca: Alokasi Dana Desa) yang diberikan oleh daerah kepada 156 desa/kelurahan (yang tersebar di 22 kecamatan) rata-rata sebesar Rp2.846.684.093,00,-. Dari gambaran ini mengemuka berbagai pertanyaan seperti apakah transfer uang kepada desa akan mengurangi kesenjangan fiskal? Apakah uang yang masuk ke desa telah disinergiskan dengan perencanaan yang terintegrasi? Apakah dana difokuskan untuk pembangunan fisik? Apakah dana dimanfaatkan untuk pengembangan modal usaha? atau Apakah kehadiran uang di desa akan semakin mengurangi kesenjangan fiskal yang direpresentasikan dengan semakin menurunnya ketimpangan wilayah antar masing-masing sistem perwilayahan di kabupaten Sumba Timur?

Dalam artikel ini, penulis akan fokus untuk menjawab pertanyaan : apakah kehadiran uang di desa menghasilkan ketimpangan fiskal yang mengarah pada ketimpangan wilayah antar sistem perwilayahan? atau apakah kehadiran uang di desa akan semakin mengurangi ketimpangan fiskal yang mengarah pada semakin menurunnya ketimpangan antar sistem perwilayahan?

Studi yang menggambarkan tentang ketimpangan wilayah sudah banyak dilakukan baik dalam cakupan negara maupun regional. Di Indonesia, kajian tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah pernah dilakukan oleh Esmara (1975), Hughes & Islami (1981), Islam & Khan (1986), Uppal & Handoko (1986), Akita (1988), Akita & Lukman (1995), Tambunan (1996, 2001), Takeda dan Nakata (1998), Garcia & Soelystianingsih (1998), Sjafrizal (1999, 2000), Booth (2000), Adifa (2007), Hartono (2008), Rahman (2009) dan sebagainya,<sup>2</sup> sedangkan di kabupaten Sumba Timur sudah pernah dilakukan oleh Haldi (2011), Hudang (2011), Huruta (2012) dan sebagainya.

Data yang digunakan dari studi-studi sebelumnya masih sama yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita kabupaten kota dan kecamatan, sedangkan pendekatan yang digunakan bervariasi antar studi. Dalam artikel ini, penulis akan mengelaborasi PDRB kecamatan yang direpresentasikan pada variabel ketimpangan wilayah (TI) dengan variabel alokasi dana desa (ADD), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah data panel untuk mendapatkan gambaran tentang kesenjangan fiskal yang terjadi selama kurun waktu 2008 – 2010 pada 5 sistem perwilayahan yang ada di kabupaten Sumba Timur.

### **Sistem Perwilayahan Kabupaten Sumba Timur**

Bappeda kabupaten Sumba Timur (2008) menyebut bahwa sesuai dengan penetapan orde perkotaan maka sistem perkotaan di kabupaten Sumba Timur dibagi menjadi 5 sistem perwilayahan. Masing-masing pusat sistem perwilayahan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan

---

<sup>2</sup> Lihat: Hudang, A, K, 2011. *Strategi Pembangunan Wilayah Dalam Rangka Penciptaan Peningkatan Pendapatan Wilayah di Kabupaten Sumba Timur*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

dan potensial yang dapat dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

Pembagian SWP di kabupaten Sumba Timur terdiri atas (1) SWP I meliputi kecamatan Kota Waingapu, Kampera, Pandawai dan Kambata Mapambuhang dengan pusat pengembangannya di kecamatan Kota Waingapu; (2) SWP II meliputi kecamatan Lewa, Nggaha Ori Angu, Katala Hamu Lingu dan Lewa Tidahu dengan pusat pengembangannya di kecamatan Lewa; (3) SWP III meliputi kecamatan Karera, Tabundung, Pinu Pahar, Matawai La Pawu, Paberiwai, Mahu dan Ngadu Ngala dengan pusat pengembangannya di kecamatan Karera; (4) SWP IV meliputi kecamatan Haharu dan Kanatang dengan pusat pengembangannya di kecamatan Haharu dan (5) SWP V (Umalulu) meliputi kecamatan Umalulu, Kahaungu Eti, Rindi, Pahunga Lodu dan Wula Waijelu dengan pusat pengembangannya di kecamatan Umalulu.

Bappeda kabupaten Sumba Timur (2011) menyebut sistem perwilayahan memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah *hinterland*-nya, sehingga diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan, penggerak perekonomian wilayah, sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Di sisi lain, dapat berperan secara efektif untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional, mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah kabupaten Sumba Timur dan mendukung rencana struktur ruang wilayah baik regional maupun nasional.

### **Gambaran PDRB, Demografi dan Geografi**

Terjadinya perbedaan perkembangan wilayah yang mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan suatu wilayah akan membentuk suatu struktur wilayah yang berhirarki, di mana wilayah yang telah maju cenderung akan cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baik perekonomian maupun pemerintahan, sedangkan wilayah *hinterland* akan cenderung menjadi wilayah yang terbelakang. Perkembangan wilayah ini dapat dilihat dari distribusi PDRB, demografi dan geografi yang tersebar pada masing-masing SWP seperti yang dirangkum dalam tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, Jumlah Penduduk. PDRB Perkapita & Luas Wilayah tahun 2010 Menurut SWP

SWP	Kecamatan	PDRB		Jmlh Penduduk		PDRB Perkapita		Luas Wilayah	
		(Juta/Rp)	(%)	Jiwa	(%)	(Rp)	(%)	Km <sup>2</sup>	(%)
I	Waingapu	144.901.356	20,2	35.419	15,2	3.793.721	6,8	73,8	1,05
	Kambera	115.996.058	16,2	31.268	13,5	3.434.384	6,1	52,0	0,74
	Pandawai	53.931.617	7,5	15.017	6,5	3.205.939	5,8	412,6	5,89
	Kambata Mpbh	13.176.827	1,8	3.479	1,5	3.107.285	5,6	412,7	5,9
<b>Total</b>		<b>328.005.858</b>	<b>45,7</b>	<b>85.183</b>	<b>36,7</b>	<b>13.541.329</b>	<b>24,3</b>	<b>951,1</b>	<b>13,58</b>
II	Lewa	39.946.693	5,6	15.696	6,8	2.249.396	4,1	281,1	4,02
	Goa	17.732.803	2,5	8.830	3,8	1.865.233	3,4	286,4	4,09
	Kahali	16.559.446	2,3	6.844	3,0	1.782.142	3,2	453,1	6,47
	Lewa Tdh	7.429.237	1,0	3.690	1,6	2.098.747	3,8	322,1	4,6
<b>Total</b>		<b>81.668.179</b>	<b>11,4</b>	<b>35.060</b>	<b>15,2</b>	<b>7.995.518</b>	<b>14,5</b>	<b>1.342,7</b>	<b>19,18</b>
III	Karera	22.919.064	3,2	7.446	3,2	2.807.026	5,1	334,6	4,78
	Tabundung	28.079.618	3,9	8.717	3,8	2.493.399	4,5	514,4	7,35
	Pinu Pahar	15.688.720	2,2	6.821	2,9	2.108.680	3,8	246,6	3,52
	Mtw L Pau	16.461.547	2,3	5.885	2,5	2.394.182	4,3	405,4	5,79
	Paberiwai	12.744.172	1,8	5.669	2,4	2.063.971	3,7	199,7	2,85
	Mahu	10.545.664	1,5	3.971	1,7	2.409.232	4,3	196,6	2,81
	Ngadu Ngl	14.946.299	2,1	4.859	2,1	2.594.514	4,7	207,9	2,97
<b>Total</b>		<b>121.385.084</b>	<b>17,0</b>	<b>43.368</b>	<b>18,6</b>	<b>16.871.004</b>	<b>30,4</b>	<b>2.105,2</b>	<b>30,07</b>
IV	Haharu	13.050.360	1,8	5.852	2,5	2.004.714	3,6	601,5	8,59
	Kanatang	18.244.049	2,5	9.481	4,1	1.984.459	3,6	279,4	2,81
<b>Total</b>		<b>31.294.409</b>	<b>4,3</b>	<b>15.333</b>	<b>6,6</b>	<b>3.989.173</b>	<b>7,2</b>	<b>880,9</b>	<b>11,4</b>
V	Umalulu	42.761.801	6,0	16.359	7,1	2.398.999	4,3	307,9	4,4
	Khngu Eti	18.282.095	2,6	8.233	3,6	2.049.282	3,7	475,1	6,79
	Rindi	28.631.161	4,0	9.173	4,0	2.686.828	4,8	366,5	5,24
	P. Lodu	41.441.844	5,8	12.071	5,2	3.057.516	5,5	349,8	5,0
	W. Waijelu	23.150.935	3,2	6.987	3,0	2.939.786	5,3	221,3	3,16
<b>Total</b>		<b>154.267.836</b>	<b>21,6</b>	<b>52.823</b>	<b>22,9</b>	<b>13.132.411</b>	<b>23,6</b>	<b>1.720,6</b>	<b>24,59</b>
<b>Sumba Timur</b>		<b>716.621.366</b>	<b>100,0</b>	<b>231.767</b>	<b>100,0</b>	<b>55.529.435</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000,5</b>	<b>100,0</b>

Sumber : BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kondisi penyebaran PDRB, demografi dan geografi antar SWP yang tidak merata berpotensi menimbulkan terjadinya ketimpangan dalam percepatan pembangunan antar SWP. Satuan wilayah pengembangan yang relatif maju (lihat: penyebaran PDRB, demografi dan geografi) didominasi oleh SWP yang berlokasi di pusat kota (Baca: *growth pole*), sedangkan SWP terbelakang didominasi oleh SWP yang berlokasi di pinggiran kota (Baca: *remote area*).

## Penyebaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan Menurut SWP

Untuk dapat memahami dengan baik besaran transfer fiskal melalui instrumen ADD/K menurut SWP, maka penulis mengelompokkan data ADD/K desa/kelurahan ke dalam masing-masing kecamatan yang tergabung dalam SWP.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa/Kelurahan 2008 - 2010 Menurut SWP

SWP	Kecamatan	ADD/K					
		2008		2009		2010	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
I	Kota Waingapu	775.629.750	5,22	775.629.750	5,22	842.093.250	4,72
	Kambera	884.007.250	5,95	884.007.250	5,95	897.118.850	5,03
	Pandawai	717.501.650	4,83	717.501.650	4,83	1.157.892.950	6,49
	Kambata Mapambuhang	483.494.950	3,25	483.494.950	3,25	576.724.800	3,23
<b>Total SWP I</b>		<b>2.860.633.600</b>	<b>19,24</b>	<b>2.860.633.600</b>	<b>19,24</b>	<b>3.473.829.850</b>	<b>19,47</b>
II	Lewa	790.567.600	5,32	790.567.600	5,32	946.266.150	5,30
	Nggaha Ori Angu	672.213.800	4,52	672.213.800	4,52	814.985.550	4,57
	Katala Hamu Lingu	427.605.650	2,88	427.605.650	2,88	508.017.700	2,85
	Lewa Tidahu	542.355.700	3,65	542.355.700	3,65	651.260.550	3,65
<b>Total SWP II</b>		<b>2.432.742.750</b>	<b>16,36</b>	<b>2.432.742.750</b>	<b>16,36</b>	<b>2.920.529.950</b>	<b>16,37</b>
III	Karera	726.917.250	4,89	726.917.250	4,89	867.119.900	4,86
	Tabundung	893.051.420	6,01	893.051.420	6,01	1.057.944.150	5,93
	Pinu Pahar	604.814.500	4,07	604.814.500	4,07	714.701.800	4,01
	Matawai La Pawu	537.095.900	3,61	537.095.900	3,61	646.918.500	3,63
	Paberiwai	638.670.300	4,30	638.670.300	4,30	760.468.450	4,26
	Mahu	557.259.500	3,75	557.259.500	3,75	659.371.600	3,70
	Ngadu Ngala	522.243.850	3,51	522.243.850	3,51	623.715.650	3,50
	<b>Total SWP III</b>		<b>4.480.052.720</b>	<b>30,14</b>	<b>4.480.052.720</b>	<b>30,14</b>	<b>5.330.240.050</b>
IV	Haharu	620.782.450	4,18	620.782.450	4,18	746.976.400	4,19
	Kanatang	474.428.880	3,19	474.428.880	3,19	552.146.950	3,09
<b>Total SWP IV</b>		<b>1.095.211.330</b>	<b>7,37</b>	<b>1.095.211.330</b>	<b>7,37</b>	<b>1.299.123.350</b>	<b>7,28</b>
V	Umalulu	963.439.750	6,48	963.439.750	6,48	1.157.892.950	6,49
	Kahaungu Eti	782.327.650	5,26	782.327.650	5,26	939.978.850	5,27
	Rindi	745.499.600	5,01	745.499.600	5,01	899.840.750	5,04
	Pahunga Lodu	833.243.000	5,61	833.243.000	5,61	1.016.194.650	5,70
	Wula Waijelu	672.849.600	4,53	672.849.600	4,53	804.596.550	4,51
<b>Total SWP V</b>		<b>3.997.359.600</b>	<b>26,89</b>	<b>3.997.359.600</b>	<b>26,89</b>	<b>4.818.503.750</b>	<b>27,01</b>
<b>Sumba Timur</b>		<b>14.866.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>14.866.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.842.226.950</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data sekunder, 2012 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008-2010 terjadi peningkatan jumlah ADD/K pada masing-masing SWP, walaupun transfer fiskal tahun 2008-2009 masih sama. Kemudian, pola kenaikan transfer fiskal untuk desa/kelurahan yang ada di dalam suatu SWP maupun SWP yang lainnya tidaklah sama. Peningkatan jumlah alokasi tersebut diduga

dimaksudkan untuk memperkuat fondasi keuangan desa dalam menunjang pembangunan di berbagai aspek. Dari gambaran ini mengemuka sebuah pertanyaan apakah peningkatan jumlah ADD/K akan semakin mengurangi kesenjangan fiskal yang direpresentasikan lewat ketimpangan wilayah di masing-masing SWP?

### Trend ADD/K dan TI di Kabupaten Sumba Timur

Sebelum menganalisis pengaruh ADD/K terhadap ketimpangan wilayah di kabupaten Sumba Timur maka perlu dilakukan perhitungan terhadap nilai Indeks Theil (*Theil Index*) dan proses logaritma terhadap nilai ADD/K.

Tabel 3. Indeks Theil dan Alokasi Dana Desa/Kelurahan 2008-2010 Menurut SWP

Tahun	SWP	TI		ADD/K*	
		Nilai	Trend	Nilai	Trend
2008	SWP I	0,001	Tetap	9,45646	Naik
2009	SWP I	0,001		9,45646	
2010	SWP I	0,001		9,54081	
2008	SWP II	0,003	Turun	9,3861	Naik
2009	SWP II	0,003		9,3861	
2010	SWP II	0,002		9,46546	
2008	SWP III	0,004	Tetap	9,65128	Naik
2009	SWP III	0,004		9,65128	
2010	SWP III	0,004		9,72675	
2008	SWP IV	0,000	Naik	9,0395	Naik
2009	SWP IV	0,001		9,0395	
2010	SWP IV	0,001		9,11365	
2008	SWP V	0,0049	Naik	9,60177	Naik
2009	SWP V	0,00419		9,60177	
2010	SWP V	0,005		9,68291	

Sumber: Data Sekunder, 2012 (diolah)

\*Angka ADD/K telah di log.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Theil diketahui bahwa *trend* ketimpangan wilayah di kabupaten Sumba Timur pada 5 Satuan Wilayah Pengembangan selama kurun waktu 2008 - 2010 cenderung berfluktuatif dan berpotensi mengalami peningkatan, serta perkembangan ADD/K juga menunjukkan *trend* yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Secara kasat mata mungkin dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat transfer fiskal, maka akan semakin meningkat pula ketimpangan wilayah. Namun, untuk mencapai sebuah kesimpulan yang mendekati kebenaran

maka perlu dilakukan sebuah uji yang terukur, sehingga di dalam artikel ini penulis menggunakan bantuan *software e-views*.

### Hubungan antara ADD/K dengan Ketimpangan Wilayah

Dalam artikel ini, ADD/K dianalogikan sebagai transfer fiskal dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa/kelurahan. Dalam konteks sistem perwilayahan, maka dengan kehadiran ADD/K diharapkan mampu menghilangkan kesenjangan wilayah sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan antara wilayah yang sudah maju dan atau sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) dengan wilayah terbelakang (*hinterland*), sehingga akan mampu mengurangi ketimpangan antara masing-masing SWP. Bertolak dari asumsi tersebut maka penulis mengajukan hipotesis:

H<sub>0</sub> : ADD/K tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

H<sub>1</sub> : ADD/K berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

### Spesifikasi Model Regresi *Panel Least Square*

Dalam artikel ini, penulis memformulasikan model analisis data panel seperti berikut:  $TI_{it} = a_0 + a_1 ADD_{it} + e_{it}$  di mana,

$TI_{it}$  : Theil Index SWP i tahun t

$ADD_{it}$  : Alokasi Dana Desa/Kelurahan i tahun t

$a_0, a_1$  : Koefisien Regresi

$e_{it}$  : *Error Term*

### Pemilihan Model Dalam Data Panel

Tahapan yang harus dilakukan jika menggunakan model data panel adalah pemilihan model yang paling baik antara *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Secara lazim, untuk melakukan pilihan antara model REM atau FEM, maka harus dilakukan *Hausman Test*. Hipotesis yang dibangun dalam uji tersebut yaitu:

H<sub>0</sub> = REM

H<sub>1</sub> = FEM

Sebagai dasar untuk menentukan model yang paling baik, maka nilai *probability* (p-value) pada statistik *Hausman Test* akan diperbandingkan dengan nilai *probability*  $\alpha = 5$  persen. Jika nilai *probability* kurang dari  $\alpha =$

5 persen maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa model yang paling baik adalah *fixed effect model* (FEM). Sedangkan jika nilai *probability* lebih dari  $\alpha = 5$  persen maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti bahwa model yang paling baik adalah *random effect model* (REM).<sup>3</sup>

Dari pengujian *Hausman Test* diperoleh hasil bahwa metode yang dipilih adalah *random effect model*. Hal ini ditunjukkan dari statistik uji *Hausman Test* sebesar 57,915413 dengan probabilitas sebesar 0,0942 yang nilainya lebih besar dari probabilitas  $\alpha = 5$  persen. Hasil uji *Hausman Test* dapat dilihat pada *output* berikut.

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Pool: RIAN  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.800378	1	0.0942

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ADD?	-0.000929	0.006076	0.000018	0.0942

Cross-section random effects test equation:  
 Dependent Variable: TI?  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/22/15 Time: 18:43  
 Sample: 2008 2010  
 Included observations: 3  
 Cross-sections included: 5  
 Total pool (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.011325	0.040176	0.281885	0.7844
ADD?	-0.000929	0.004278	-0.217021	0.8330

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.956813	Mean dependent var		0.002606

<sup>3</sup> Lihat: Saraswati, B, D, 2014. *Pengolahan Model Panel Data Menggunakan Software Eviews*, Materi Kuliah Analisis Ekonomi Sumberdaya Manusia, Salatiga: Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.

Adjusted R-squared	0.932820	S.D. dependent var	0.001684
S.E. of regression	0.000436	Akaike info criterion	-12.34660
Sum squared resid	1.71E-06	Schwarz criterion	-12.06338
Log likelihood	98.59953	Hannan-Quinn criter.	-12.34962
F-statistic	39.87897	Durbin-Watson stat	2.518740
Prob(F-statistic)	0.000007		

Sumber: Output E-Views, 2014 (diolah)

## Hasil Estimasi

Metode yang digunakan untuk tahap analisis data di dalam artikel ini yaitu *random effect model*. Hasil uji *random effect model* dapat dilihat pada *output* berikut.

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 06/22/15 Time: 19:52  
 Sample: 2008 2010  
 Included observations: 3  
 Cross-sections included: 5  
 Total pool (balanced) observations: 15  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.054452	0.008314	-6.549641	0.0000
ADD?	0.006076	0.000885	6.865474	0.0000
Random Effects (Cross)				
_SWP1--C	-0.000303			
_SWP2--C	-2.79E-05			
_SWP3--C	-0.000254			
_SWP4--C	9.81E-05			
_SWP5--C	0.000486			

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000419	0.4800
Idiosyncratic random		0.000436	0.5200

Weighted Statistics			
R-squared	0.761034	Mean dependent var	0.001342
Adjusted R-squared	0.742652	S.D. dependent var	0.000918
S.E. of regression	0.000466	Sum squared resid	2.82E-06
F-statistic	41.40107	Durbin-Watson stat	1.829339
Prob(F-statistic)	0.000022		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.887521	Mean dependent var	0.002606
Sum squared resid	4.47E-06	Durbin-Watson stat	1.155075

Sumber: Output E-Views, 2014 (diolah)

Dari output *random effect model* di atas dapat diturunkan formulasi sebagai berikut:

$$TI_{it} = - 0.054452 + 0.006076 ADD_{it}$$

Keterangan:

1. Nilai ketimpangan wilayah sebesar  $- 0,054452$  jika variabel Alokasi Dana Desa/Kelurahan dianggap nol (diabaikan).
2. Peubah bebas dapat menjelaskan 76,10 persen dari variasi yang terjadi pada peubah ketimpangan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan ini memiliki *goodness of fit* yang bagus, dalam artian mampu menjelaskan fenomena yang dikaji dengan baik.
3. Nilai F hitung sebesar 41,40107, sedangkan nilai F tabel sebesar 4,6672 ( $df_1 = 1$  dan  $df_2 = 13$ ) pada  $\alpha = 5$  persen. Ini menunjukkan bahwa F hitung  $>$  F tabel. Dengan kata lain, secara simultan model yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap peubah ketimpangan wilayah.
4. Nilai DW statistik sebesar 1,829339 (berada di antara 1,33 dan 2,66)<sup>4</sup>, Artinya tidak terjadi korelasi serial antar observasi dalam satu peubah atau korelasi antar eror masa lalu dengan eror masa sekarang.

### Pengaruh Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Ketimpangan Wilayah

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien alokasi dana desa/kelurahan sebesar 0,006076. Artinya peningkatan alokasi dana desa/kelurahan sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 0.006076 persen. Nilai t hitung 6,865474  $>$  t tabel 2,160 pada aras pengujian 2 arah yang berarti bahwa variabel ini berpengaruh signifikan pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 5 persen. Hal ini juga didukung dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ). Temuan ini

<sup>4</sup> Lihat: Algifari (1997, dalam Nugrahanti, 2006)

sejalan dengan temuan Uppal dan Handoko (1986) yang menyebut faktor yang menyebabkan kesenjangan antar daerah berupa transfer pemerintah pusat melalui berbagai macam *grant* dan juga sejalan dengan temuan Hartono (2008) yang menyebut alokasi dana bantuan pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya semakin meningkat alokasi dana bantuan maka semakin meningkat pula ketimpangan pembangunan ekonomi. Secara teoritis, kehadiran transfer fiskal sejatinya untuk menghilangkan kesenjangan fiskal, namun yang terjadi malah semakin menimbulkan kesenjangan antar wilayah.

Dalam kasus di Sumba Timur, ditemukan bahwa memang pola kenaikan transfer fiskal berbeda untuk masing-masing SWP (Lihat: Tabel 2). Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan anggaran transfer fiskal hendaknya dipertimbangkan untuk mendorong produktivitas atau untuk menghilangkan kesenjangan atau sekaligus kedua-duanya. Tentu skema yang dibangun oleh pemerintah harus benar-benar dijalankan secara konsisten sesuai dengan kewenangannya, sehingga kehadiran transfer fiskal tersebut dapat menjadi *mainstream* dalam penanggulangan kesenjangan sekaligus meningkatkan produktivitas masing-masing desa/kelurahan di dalam SWP. Kemudian, diduga bahwa sejatinya pemerintah daerah telah terjebak di dalam mekanisme alokasi sedekah (Bandingkan: *block grant*, *specific grant* & *rigid grant*) yang memberikan dana ala kadarnya kepada seluruh desa/kelurahan (Lihat: halaman 2). Hal inipun semakin diperparah dengan beberapa asumsi yang membuat ADD belum mampu menjadi *mainstream* untuk memerangi persoalan kemiskinan di desa seperti besaran ADD yang “tanggung” (terbatas), penanggulangan kemiskinan bukan tanggung jawab pemerintah desa, ketiadaan fasilitasi (pendampingan) dan dana pendampingan dan adanya *social distrust* (Lihat: halaman 2 - 3).

Perbedaan kondisi daerah untuk masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP) yang mencolok baik dari sisi distribusi PDRB, demografi, geografi dan sebagainya juga diduga sebagai faktor yang membuat SWP yang maju (*growth pole*) akan semakin maju dan SWP yang terbelakang (*hinterland*) akan semakin miskin. Secara teoritis, di dalam teori tempat sentral (*central place theory*) diisyaratkan bahwa pertumbuhan dari suatu kota merupakan akibat penyediaan barang dan jasa pada daerah belakangnya. Artinya pertumbuhan daerah perkotaan adalah fungsi dari penduduk dan tingkatan pendapatan daerah

belakangnya, sedangkan laju peningkatan pertumbuhannya tergantung pada laju permintaan dari daerah belakang atas barang dan jasa atau pelayanan perkotaan. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim hubungan yang bersifat generatif antara daerah yang maju dengan daerah belakangnya, sehingga lewat kerjasama tersebut mampu mengurangi kesenjangan wilayah.

## **Kesimpulan**

Kehadiran alokasi dana desa/kelurahan sejatinya merupakan upaya yang perlu diapresiasi, oleh karena dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Namun, pada saat yang bersamaan dalam konteks sistem perwilayahan di kabupaten Sumba Timur ternyata menimbulkan ketimpangan wilayah antara kelima satuan wilayah pengembangan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil etimasi data panel yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara alokasi dana desa/kelurahan dengan ketimpangan wilayah. Artinya semakin meningkat jumlah alokasi dana desa/kelurahan, maka akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan wilayah di antara masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP). Diduga ada beberapa hal yang membuat transfer fiskal belum dapat menjadi *mainstream* untuk menghilangkan kesenjangan wilayah seperti kebijakan pemerintah (*government policy*), relasi antara masing-masing SWP yang belum mencerminkan *spread effect* (efek penyebaran) dan sebagainya.

## **Implikasi Kebijakan**

Pada masa transisi ini sudah saatnya pemerintah daerah untuk merenung kembali apakah peningkatan *budget* transfer fiskal ditujukan semata-mata hanya untuk peningkatan produktivitas, menghilangkan kesenjangan fiskal, atau sekaligus kedua-duanya? Kemudian, pemerintah perlu mengawal pola mekanisme penyaluran serta secara akuntabel mengawasi pelaksanaan atas produk undang-undang mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam bentuk SWP, sehingga dengan kemampuan fiskal yang memadai dari masing-masing desa/kelurahan juga mampu membangun relasi yang generatif di antara

wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dalam konteks sistem perwilayahan.

Pemerintah juga perlu mengembangkan sarana dan prasarana wilayah guna meningkatkan *location rent* dari wilayah desa, sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi (pengembangan modal usaha), sosial dan budaya. Kemudian, pembangunan secara fisik yang selama ini diejawantahkan juga perlu diikuti oleh ideologi pembangunan lewat pelestarian, sehingga arah pembangunan dikemudikan sesuai dengan logika yang benar sebagai sebuah proses perubahan sosial berdasarkan tata nilai tertentu di dalam masyarakat.

### **Implikasi Teoretis**

Proses transfer fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke desa/kelurahan merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji secara mendalam di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan kurang adanya sinergitas antara uang yang masuk ke desa dengan perencanaan yang terintegrasi, serta rentan terjadinya mekanisme alokasi desekah yang mengakibatkan kesenjangan wilayah tetap terpelihara. Sebagai konsekuensi logis dari kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di desa, maka penulis hanya memotret dan mengkaji pengaruh ADD/K terhadap ketimpangan wilayah saja, sehingga di sini terbuka peluang untuk dilakukannya studi dengan kasus yang sama maupun kasus-kasus lainnya yang dikaji dari berbagai macam perspektif untuk dapat mengkritisi penelitian terdahulu dan semakin memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Studi lanjutan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang diantaranya membuktikan kebenaran atas keempat asumsi yang dikemukakan oleh Habriono (2008 : 10 – 11), pengelolaan ADD/K dalam perspektif modal sosial dan sebagainya.

### **Referensi**

Adifa, Yunus, 2007. *Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

- [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun 2005-2025*, Kab. Sumba Timur
- [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumba Timur tahun 2008-2028*, Kab. Sumba Timur.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. *Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2011*, Sumba Timur: BPS.
- Haldi, Heribertus. 2011. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur*, Waingapu: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana Sumba
- Hartono, Budiantoro, 2008. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Hudang, A, K, 2011. *Strategi Pembangunan Wilayah Dalam Rangka Penciptaan Peningkatan Pendapatan Wilayah di Kabupaten Sumba Timur*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Huruta, A, D, 2012. *Analisis Ketimpangan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Sumba Timur*, Sumba: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana.
- Habriono, H, 2008. *ADD: Senjata Ampuh Penanggulangan Kemiskinan?*, Majalah Mudik "Media Pembaharuan Desa" Edisi 10 Agustus 2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Kabalmay, R, R, 2008. *Uang dan Ruang Untuk Membangun Ekonomi Desa*, Majalah Mudik "Media Pembaharuan Desa" Edisi 10 Agustus 2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Nugrahanti, Y, W, 2006. *Hubungan Antara Luas Ungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Dengan Earnings Response Coefficient dan Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman Laba*, Hal, 164, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. XXII, No. 2, September 2006, Salatiga: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Rahman, A, 2009. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Sumbas*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Saraswati, B, D, 2014. *Pengolahan Model Panel Data Menggunakan Software Eviews*, Materi Kuliah Analisis Ekonomi Sumberdaya Manusia, Salatiga: Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.
- Uppal dan Handoko, 1986. *Regional Income Disparities in Indonesia*, Jakarta: Ekonomi Keuangan Indonesia, vol. XXXIV, No. 3, hal 285 - 306.